

**PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN INTENSITAS ASET TETAP
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL
MODERATING
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2012-2016)**

NURUL ADRISA (20141112061)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of leverage, inventory intensity, capital intensity on tax avoidance with audit committee as moderating variabel at Financial Performance of Consumer Goods sector for the year 2012 to 2016. The independent variables used in this study were of leverage, inventory intensity, capital intensity and the tax avoidance as dependent variable measured by CETR. This study also use audit committee as a moderating variable. Sample selection method using purposive sampling. The sample used in this study are 32 manufacturing companies included in the consumer goods sector that listed on Indonesia Stock Exchange for the year 2012 to 2016. The data analysis method that used is multiple linear regression with Eviews 9.0 software for processing the data. The research result showed that leverage, capital intensity has no significant effect on tax avoidance; inventory intensity and audit committee has negatively effects on tax avoidance. The moderate audit committee is able to moderate the influence of inventory intensity; audit committee are not able to moderate the influence of leverage and the influence of capital intensity on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance (CETR), leverage, inventory intensity, capital intensity and audit committee.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Waluyo (2011) mengatakan salah satu usaha suatu negara dalam mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak sekitar 85,6% (Kementerian Keuangan, 2017). Pajak dituntut untuk terus ditingkatkan karena semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar, maka harus diatur oleh undang-undang. Berikut adalah data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu mencapai angka maksimal.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak 2012-2016

No.	Tahun	Rencana Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan
1	2012	1.016,2 Triliun	980,5 Triliun	96,5 %
2	2013	1.148,4 Triliun	1.077,3 Triliun	93,8 %
3	2014	1.246,1 Triliun	1.146,9 Triliun	92 %
4	2015	1.489,3 Triliun	1.240,4 Triliun	83,3 %
5	2016	1.539,2 Triliun	1.285,0 Triliun	83,5 %

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018)

Dari data diatas menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan kontribusi besar pada anggaran penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola oleh pemerintah dengan baik.

Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala, akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dan menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Agusti, 2014).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun, bagi perusahaan sendiri pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, et al, 2010).

Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan. Karakteristik keuangan dapat dilihat melalui kebijakan hutang, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap perusahaan.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Jumlah utang yang terus bertambah akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang menurut Putri dan Putra (2017).

Tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan (Putri & Launtania, 2016).

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Noor dan Sabli, 2012). Tingginya jumlah aset dalam perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan.

Variabel pemoderasi *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan komite audit. Komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan yang bekerja secara profesional dan independen (Effendi, 2016). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* Kurniasih (2013). Komite diberikan tanggung jawab oleh para dewan perusahaan terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan memodifikasi model penelitian. Dimana penelitian ini (i) membedakan serta memperbaharui periode penelitian yaitu tahun 2012-2016, (ii) menggunakan objek yang lebih spesifik yaitu perusahaan manufaktur khususnya pada subsektor barang konsumsi, (iii) menggunakan variabel independen yang lebih beragam yaitu Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan menambahkan variabel moderasi yaitu komite audit. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan sebab diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai variabel *moderating* studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016”.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Suatu hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen merupakan teori agensi menurut Anthony dan Govindrajan dalam Siagian (2011). Teori agensi diasumsikan kepentingan dari setiap individu yang menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai *agent*) dengan pemilik perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai *principal*).

Menurut Godfrey et al. (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan pada dasarnya menimbulkan biaya agensi. Biaya agensi yang timbul adalah sebagai biaya pemantauan terhadap agen. Biaya yang dikeluarkan oleh principal berupa biaya untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen.

Dalam penelitian ini, dapat dihubungkan kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang yang berbeda, antara fiskus sebagai pemungut pajak dan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak ini yang menyebabkan konflik.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak Dasar perhitungan besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Penghasilan Kena Pajak yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan.

2.1.3 Tax Planning

Sesungguhnya ada rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak karena tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat memberikan keuntungan bagi pembayar pajak. Sehingga perusahaan akan meminimalkan, menghilangkan atau menunda kewajiban pajaknya yang terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan mengurangi beban pajak terutang.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang meliputi proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat diseleksi untuk menentukan jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan, Rahman (2012); Purwanggono (2015).

2.1.4 Tax Avoidance

Penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara "legal" dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (www.pajak.go.id).

Penghindaran pajak digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum atas urusan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah melakukan tindakan ilegal untuk menghindari dari membayar pajak (Aumeerun et al., 2016). Dapat disimpulkan bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarnya dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam hukum perpajakan, sehingga tetap dalam koridor hukum.

2.1.5 Kebijakan Hutang

Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar kemampuan perusahaan yang digambarkan pendanaan utang daripada saham (I Gede Yoga Yudiana dan I Ketut Yadnyana, 2016).

Leverage perusahaan digunakan untuk pembayaran dividen agar dapat menjaga performa dan sinyal perusahaan bagi investor. *Leverage* digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban financial suatu perusahaan. Faktor hutang mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam pembayaran dividen pada share holder (Indrima Faujimi, 2014). Faktor tersebut mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang.

2.1.6 Intensitas Persediaan

Inventory Intensity Ratio menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu

periode tertentu (Putri dan Lautania, 2016). Menurut Harahap (2009) rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan.

PSAK 14 NO.13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang timbul akibat tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan dan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Biaya yang timbul meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut akan diakui sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak.

2.1.7 Intensitas Aset Tetap

Capital intensity dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap, sehingga *capital intensity ratio* diukur dengan berapa proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Zarai (2013) menyebutkan bahwa rasio ini menggambarkan intensitas modal dari aktivitas yang dijalankan perusahaan.

Delgado et al. (2014) menyebutkan bahwa komposisi aset dapat memiliki efek yang jelas pada *Effective Tax Rate*, khususnya aset tetap yang memungkinkan perusahaan untuk memotong beban pajak yang berasal dari biaya penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap, cenderung memiliki tarif efektif pajak yang lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

2.1.8 Komite Audit

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan faktor kunci dalam meningkatkan nilai perusahaan, yang mana pada dasarnya menunjukkan bagaimana perusahaan dikelola, dipandu, dan dikendalikan; dan berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, bimbingan, dan kontrol manajemen (Uwuigbe, 2014). Komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016). Terdapat lima asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. *Corporate governance* sangat penting karena merupakan faktor dalam pengendalian perusahaan, sehingga aktivitas di dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” Dewan Komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan (Effendi, 2016). Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Harus adanya penyesuaiannya antara jumlah anggota komite audit dengan kompleksitas perusahaan. Penyesuaiannya tersebut harus tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak

Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Tetapi Rasio *leverage* menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan, sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Saputra (2017) mengungkapkan hutang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu beban bunga. Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba.

H1 : Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.2 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan, Harahap (2009). PSAK 14 NO.13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang timbul akibat tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan dan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Biaya yang timbul meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut akan diakui sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak.

H2 : Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap, sehingga *capital intensity ratio* diukur dengan berapa proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Zarai (2013) menyebutkan bahwa rasio ini menggambarkan intensitas modal dari aktivitas yang dijalankan perusahaan.

Komposisi aset dapat memiliki efek yang jelas pada *Effective Tax Rate*, khususnya aset tetap yang memungkinkan perusahaan untuk memotong beban pajak yang berasal dari biaya penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap, cenderung memiliki tarif efektif pajak yang lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

H3 : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit merupakan organ perusahaan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas. Perusahaan *go public* minimal harus memiliki Komite Audit, untuk komite lainnya dibentuk sesuai kebutuhan (Effendi, 2016). Komite Audit berperan dalam penerapan GCG. Hasil penelitian Minnick dan Noga (2010) memberikan dukungan pentingnya peranan tata kelola perusahaan terhadap perencanaan manajemen pajak secara jangka panjang. Hasil penelitian Richardson et al., (2013) menunjukkan agresivitas pajak dapat dikurangi apabila sistem pengendalian risiko baik, keberadaan auditor eksternal berkualitas serta independensi anggota komite audit dan kuatnya kontrol internal.

Richardson et al., (2013) menunjukkan agresivitas pajak dapat dikurangi apabila sistem pengendalian risiko baik, keberadaan auditor eksternal berkualitas serta independensi anggota komite audit dan kuatnya kontrol internal. Penerapan GCG juga dapat mengurangi agresivitas pelaporan keuangan, karena adanya pengawasan dari Komisariss Independen dan Komite audit.

H4 :Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H4a :Komite audit akan memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak.

H4b :Komite audit akan memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

H4c :Komite audit akan memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih sektor manufaktur karena dinilai sebagai salah satu sektor yang strategis yaitu berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui setoran pajak. Total populasi penelitian ini adalah 42 perusahaan, namun setelah dilakukan pengambilan sampel dengan melihat beberapa kriteria dari *metode purposive sampling*, didapatkan sampel penelitian sebesar 32 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun.

3.2 Operasional Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Tax Rate* perusahaan adalah kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Variabel independen yang digunakan yaitu Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Variabel moderasi menggunakan Komite Audit.

Tabel 2
Ringkasan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Pengukuran	Skala
	Dependen		
1	<i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)	$\frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre – Tax Income}}$	Rasio
	Independen		
2	<i>Debt Ratio</i>	$\frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Assets}}$	Rasio
3	<i>Inventory Intensity Ratio</i>	$\frac{\text{Total Inventory}}{\text{Total Assets}}$	Rasio
4	<i>Capital Intensity Ratio</i>	$\frac{\text{Total Assets}}{\text{Sales}}$	Rasio
	Pemoderasi		
5	Komite audit	Jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan i pada tahun t	Nominal

Sumber: Data diolah penulis (2018)

3.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi *Eviews* 9.0. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif; Analisis regresi data panel dengan menggunakan uji chow dan hausman untuk menentukan model yang digunakan; Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi; serta melihat nilai koefisien determinasi (R^2). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji t (uji parsial).

3.4 Persamaan Penelitian

$$CETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 DR_{i,t} + \beta_2 IIR_{i,t} + \beta_3 CIR_{i,t} + \beta_4 KA_{i,t} + \beta_5 DR*KA_{i,t} + \beta_6 IIR*KA_{i,t} + \beta_7 CIR*KA_{i,t} + e_{i,t}$$

Keterangan:

$CETR_{i,t}$ = *Cash Effective Tax Rate*

$\beta_{i,t}$ = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = Koefisien regresi

$DER_{i,t}$ = Kebijakan Hutang

$IIR_{i,t}$ = Intensitas Persediaan

$CIR_{i,t}$ = Intensitas Aset Tetap

$KA_{i,t}$ = Komite Audit

$DER*KA$ = Interaksi Kebijakan Hutang dengan Komite Audit

$IIR*KA$ = Interaksi Intensitas Persediaan dengan Komite Audit

$CIR*KA$ = Interaksi Intensitas Aset Tetap dengan Komite Audit

$e_{i,t}$ = *error term*

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	CETR	DR	IIR	CIR	KA
Mean	0.278354	0.417086	0.234611	0.842379	3.021127
Median	0.267470	0.417352	0.191412	0.787405	3.000000
Maximum	0.986937	1.248573	0.642019	5.939939	4.000000
Minimum	-0.214834	0.006619	0.015951	0.346483	0.000000
Std. Dev.	0.175021	0.189212	0.150588	0.505944	0.564535
Skewness	0.829806	0.909382	1.225695	7.287904	-2.842280
Kurtosis	6.429657	5.624874	3.686943	73.81662	18.77240
Jarque-Bera	85.89142	60.33739	38.34712	30929.06	1663.073
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	39.52627	59.22616	33.31474	119.6178	429.0000
Sum Sq. Dev.	4.319185	5.047989	3.197416	36.09305	44.93662
Observations	142	142	142	142	142

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) dari CETR sebesar 0.278354 dan nilai median sebesar 0.267470. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih rendah daripada nilai median yang berarti bahwa nilai rata-rata perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi cenderung melakukan penghindaran pajak yang dilihat *Cash Effective Tax Rate*. *Mean* DR adalah sebesar 0.417086 dengan median sebesar 0.417352. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih rendah dibandingkan median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi memiliki nilai debt ratio yang rendah. Variabel IIR memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.234611 dan nilai standar deviasi 0.150588. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa variabel IIR memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil di dalam variabel ini. Variabel *Capital Intensity Ratio* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.842379 dan nilai standar deviasi 0.505944. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa variabel *Capital Intensity Ratio* memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil di dalam variabel ini. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.021127 dan nilai standar deviasi 0.564535. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa variabel CETR memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil di dalam variabel ini.

4.2 Pengujian Model

Tabel 4
Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DR	-1.151737	0.652683	-1.764619	0.0799
IIR	-4.345477	1.743517	-2.492363	0.0139
CIR	0.092164	0.091720	1.004837	0.3168
KA	-0.326972	0.093784	-3.486438	0.0007
DR*KA	0.322539	0.213164	1.513105	0.1326
IIR*KA	1.417974	0.580940	2.440826	0.0160
CIR*KA	-0.042046	0.039836	-1.055492	0.2931
C	1.372973	0.268077	5.121561	0.0000

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Model yang digunakan dalam mengestimasi regresi data panel adalah *Random Effect*. Setelah dilakukan pengolahan dengan aplikasi *Eviews 9.0* data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah asumsi klasik. Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas kebijakan hutang, intensitas aset tetap lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05, maka kedua variable tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan, komite audit memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05, sehingga variable intensitas persediaan, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan kebijakan hutang dengan penghindaran pajak dan hubungan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak. Komite audit berpengaruh terhadap hubungan intensitas persediaan dengan penghindaran pajak.

4.3 Koefisien Determinasi

Tabel 5
Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.380416	Mean dependent var	0.117338
Adjusted R-squared	0.348049	S.D. dependent var	0.131530
S.E. of regression	0.105021	Sum squared resid	1.477946
F-statistic	11.75344	Durbin-Watson stat	1.944921
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang (*Debt Ratio*), intensitas persediaan (IIR), intensitas aset tetap (CIR) dan komite audit (KA) mampu menjelaskan pengaruh kepada penghindaran pajak hanya sebesar 34.8049%. Sisanya sebesar 65.1951% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti.

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR pada tabel 4 menunjukkan hasil kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kebijakan hutang yang diprosikan dengan *debt to asset ratio* menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Agusti, 2014).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012). Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang menjadi sampel memiliki jumlah hutang yang relatif kecil. Penghindaran pajak berbanding lurus dengan CETR, secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan (Kurniasih, 2013).

Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian Kurniasih (2013) dan Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, perusahaan tidak memiliki laba yang memuaskan maka kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga akan diragukan. Sehingga perusahaan dengan tingkat kewajiban yang tinggi akan menyebabkan perusahaan meningkatkan laba periode berjalan. Hal tersebut menunjukkan perusahaan tidak agresif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah tidak akan bermasalah dengan tingkat laba yang rendah karena perusahaan tidak sedang terikat dengan kontrak utang pada pihak ketiga. Sehingga tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat agresivitas pajak karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka perusahaan cenderung akan meningkatkan laba mereka. (Watts dan Zimmerman, dalam Adisamartha dan Noviari (2015).

4.4.2 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *inventory intensity ratio* yang dimiliki suatu perusahaan maka akan memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* yang rendah sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Derashid dan Zhang (2003), Hadjidema & Eleftheriou (2016), dan Norfadzilah (2015) yang menyatakan bahwa *inventory intensity ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena *inventory intensity* tidak termasuk ke dalam *tax deductible* dalam sistem perpajakan. Namun, manajer membutuhkan usaha lebih untuk mengatur *inventory intensity* perusahaan untuk mengurangi tingkat beban pajak perusahaan. Dengan kata lain, metode evaluasi persediaan yang kurang efisien akan mengakibatkan tingginya biaya operasi dan akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan.

Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

4.4.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Pada tabel 4 menunjukkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap (CIR) tidak berpengaruh terhadap *Cash Effective Tax Rate*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2012). Tidak adanya pengaruh dari Intensitas Aset Tetap pada tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan diakibatkan oleh perusahaan dengan tingkat Intensitas Aset Tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan memengaruhi tingkat agresivitas yang akan dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chiao *et, al.*, (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap tidak ada berpengaruh dengan *Effective Tax Rate*, dan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4 diatas, keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa komite audit yang bertugas melakukan *monitoring* penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen yang melakukan kecurangan. Keberadaann komite audit yang besar dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas *Good Corporate Governance* yang baik di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Maharani dan Suardana (2014).

Struktur komite audit, diketuai oleh komisaris independen dan anggota komisaris atau komisaris independen, tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa penghindaran pajak dalam perusahaan dapat dihindari. Ketentuan struktur komite audit hanya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dari perseroan terbatas. Annisa dan Kurniasih (2012), fungsi komite audit dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan. Dalam perusahaan jika audit komite tidak memiliki dukungan dari semua elemen perusahaan, maka dimungkinkan untuk adanya upaya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarwati, Dewi dan Lin (2017).

Pada tabel 4, komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak dan pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Tetapi dihasilkan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

4.5 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik cenderung mempunyai konflik atau perbedaan kepentingan antara principal dengan agen yang rendah. Hal ini dikarenakan tujuan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan maka semakin besar manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang.

Hasil penelitian untuk variabel independen intensitas persediaan yang diproksikan dengan *Inventory Intensity Ratio* menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan akan memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* yang rendah dan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sehingga pihak manajemen perusahaan membutuhkan usaha lebih untuk mengatur *Inventory Intensity* perusahaan untuk mengurangi tingkat beban pajak perusahaan.

Variabel independen intensitas aset tetap menunjukkan hasil bahwa tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap pada perusahaan manufaktur tidak mempengaruhi besaran *Cash Effective Tax Rate* yang dihasilkan oleh perusahaan dan terdapat indikasi bahwa pada perusahaan manufaktur terdapat banyak aset tetap yang habis umur ekonomisnya. Ketika suatu perusahaan membeli aset dengan umur di atas satu tahun, perusahaan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu penggunaannya. Sehingga mengakibatkan intensitas pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel moderasi komite audit menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak dan pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Tetapi komite audit dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Adanya komite audit dalam perusahaan tidak mampu mengontrol tindakan manajer yang dikarenakan kurangnya peran komite audit dalam aktivitas perusahaan. Komite audit melakukan dan menjalankan tugasnya berdasarkan bukti-bukti transaksi, tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional, sehingga tidak mengetahui apakah jumlah pengeluaran sesungguhnya sesuai dengan bukti yang ada. Salah satu pemicunya adalah belum adanya keselarasan tujuan antara karyawan, manajemen dan pimpinan, sehingga jika

tidak diawasi mereka berbuat kecurangan. Komite audit yang ada dalam perusahaan hanya sebagai pemenuhan regulasi pemerintah bagi perusahaan *go public*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas dalam melakukan pengawasan, pengevaluasian kinerja operasional, meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak berjalan efektif apabila tidak mendapat dukungan dari keseluruhan elemen yang ada di dalam perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa penelitian ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan terjadi *agency problem* yang ditimbulkan oleh pihak pemilik kepentingan yaitu pihak manajemen (*agen*) dan pemilik perusahaan (*principal*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan hutang, intensitas aset tetap, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Intensitas persediaan, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan kebijakan hutang dengan penghindaran pajak dan hubungan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak. Komite audit berpengaruh terhadap hubungan intensitas persediaan dengan penghindaran pajak.

Sampel penelitian ini masih terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan satu proksi untuk penghindaran pajak yaitu *Cash Effective Tax Rate*. Oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan proksi yang berbeda seperti *BTD (Book Tax Gap)* dan perbandingan *NPM (Net Profit Margin)* dan menambahkan variabel independen dan variabel moderasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 973-1000.
- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Andriyani, M. (2008). *Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Insider Ownership, Investment Opportunity Set (IOS), dan Profitability terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan Automotive di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2004-2006)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Ardyansyah, D. Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rates (ETR)(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 01-19.
- Aumeerun, B., Jugurnath, B., & Soondrum, H. (2016). Tax evasion: Empirical evidence from sub-Saharan Africa. *Journal of Accounting and Taxation*, 8(7), 70.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Chiao YC, Hsieh YC, Lin W "Determinants of Effect Tax Rates for Firm Listed on China's Stock Markets : Panel Models with Two-Sided Cencors", the Business & Management Review, Vol. 3 Number 1, November 2012.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 143-161.
- Delgado, F. J., Fernandez-Rodriguez, E., & Martinez-Arias, A. (2014). Effective tax rates in corporate taxation: A quantile regression for the EU. *Engineering Economics*, 25(5), 487-496.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 257.
- Dharma, I. Made Surya dan Putu Agus Ardiana.(2016). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 15.
- Dyreng, Scott D, Hanlon, Michelle, Maydew Edward L. (2010). "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting review*, 85, 1163-1189.
- Effendi, M. Arief. 2016. *The Power of Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Faujimi, I. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 (7th ed)*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., et. al. (2010). *Accounting Theory (7th ed)*. Australia : John Wiley & Sons Australia, Ltd
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometrís. México: McGrawHill. Links*.
- Gujarati, Damodar N. (2012). *Basic Ecometrics*. Edisi ke-5, Edisi Internasional. Singapore:Mc Graw-Hill
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1-34.
- Harahap, Rosna K., dan D.M. Jiwana. 2009. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. No.3/TH.2009
- Hartadinata, O. S., & Tjaraka, H. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA) | Journal of Economics and Business Airlangga*, 23(3).
- Jessica, J., & Toly, A. A. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 222.
- Kieso, D. E. dan Weygandt, J. J. 2013. *Intermediate Accounting*. John Wiley and Sons.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2007). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50-70.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. 2013. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management?. *Journal of corporate finance*, 16(5), 703-718.
- Norfadzilah, Nik Mohd et al. 2015. Longitudinal Study of Corporate Tax Planning: Analysis on Companies' Tax Expense and Financial Ratios. *Pertanika Journal Social Science & Humanities*, 23: 109-120
- Noor et al. 2010. Corporate Tax Planning : A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysia Listed Companie. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 1
- Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari, Hastri Niar. (2016). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper.

- Pradipta, D. H. Supriyadi. 2015. *In Influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Profitability, Leverage, and Independent Commissioner Against Tax Avoidance Practice. Accounting National Symposium (Vol. 18).*
- Purwanggono, E. A., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak. *Disertasi Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 101-119.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1-11.
- Putri, V. R., & Sary, S. (2017). Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 10(1), 39-51.
- Richardson, G., Lanis, R. 2007. Determinants of variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (2007), 689-704.
- Rohaya, M. N., Nur, S. M. F., & NorAzam, M. (2010). Corporate tax planning: a study on corporate effective tax rates of Malaysian listed companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189-193.
- Sabli, N., & Noor M. R. (2012). Tax Planning and Corporate Governance. *Proceeding International Conference on Business and Economic Research Bandung*. ISBN: 978-967-5705-05-2.
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach (6th ed)*. United Kingdom : John Wiley & Sons
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business. Chices: John Wiley dan Sons.*
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Siswanto, V. A., & Pratama, S. W. (2015). *Belajar Sendiri SPSS 22*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2010). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Uwugbe, U., Peter, D. S., & Oyeniya, A. (2014). The effects of corporate governance mechanisms on earnings management of listed firms in Nigeria. *Accounting and Management Information Systems*, 13(1), 159.
- Waluyo. 2011. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: EKONISIA.

Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews-3/E

www.kemenkeu.go.id

www.pajak.go.id

Yudiana, I. G. Y., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Investment Opportunity Set dan Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 111-141.

Yuniarwati, I., Dewi, S. P., & Lin, C. (2017). Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510-517.

Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1).

Zarai, Mohamed Ali. 2013. *Corporate Tax Planning and Debt Endogeneity: Case of American Firms*. *International Journal of Business and Commerce*, 3(3).

